|  |  |
| --- | --- |
| Jurnal Akuntansi Terapan IndonesiaVol xxx No xxx Hal Date Month Year | Article Type: Research Paper**Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada EkowisataTerhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa**Aliya Nur Aisyah\*1, Driana Leniwati2 **Abstract****:***The goal of this study is to learn how to manage tourism objects through Village Owned Enterprises (BUMDes) in order to boost village income (PADes). To achieve the research objectives, the research was conducted in Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency. Research This case study uses a qualitative descriptive method. Qualitative data obtained by conducting interviews, observations and documentation. The informants in this study were the Village Head, the President Director of the Village-Owned Enterprise and the Sanankerto Village community. Data reduction, data presentation, and generating conclusions/verification are the data analysis strategies used in this study. The results of the study stated that Village Original Income from the tourism sector through the principle of managing Village-Owned Enterprises had been going well. However, there are several obstacles in the application of participatory principles, namely the quality of Human Resources (HR) that need to be trained.**Keywords: Management Principles, tourism, BUMDes, PADes***Abstrak:**Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana mengelola objek wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka meningkatkan pendapatan desa (PADes). Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian dilakukan di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Penelitian Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Direktur Utama BUMDes dan masyarakat Desa Sanankerto. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Desa dari sektor pariwisata melalui prinsip pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala dalam penerapan prinsip partisipatif yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dilatih.Kata Kunci: Prinsip Pengelolaan, wisata, BUMDes, PADes**PENDAHULUAN**Pemerintahan dalam memudahkan desa mengelolah potensi yang ada yaitu dengan menerapkan strategi yang mampu meningkatkan perekonomian desa termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam  |
| Affiliation:Universitas Muhammadiyah Malang \*Correspondence:aliyaaisyah13@gmail.comThis Article is Avalilable in: [https://journal.umy.ac.id/index. php/jati/](https://journal.umy.ac.id/index.%20php/jati/article/view/8385) DOI:10.18196/jati.xxxCitation:xxx. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, x*(x), xx-xx.Article HistoryReceived:xx xx xxxReviewed :xx xx xxxRevised :xx xx xxxAccepted:xx xx xxxTopic Article:Financial Accounting/Management Accounting/Syari’ah Accounting/etc |

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menggerakkan perekonomian di Desa maka didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sesuai dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang di dalamnya menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di Indonesia terdapat 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mangkrak atau tidak beroperasi, akan tetapi terdapat 1.670 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa. Oleh karena itu BUMDes "harus direvitalisasi". Salah satu caranya adalah dengan masuk ke sektor produktif seperti bisnis pasca-panen yang memiliki nilai ekonomi atau pariwisata Tirto.id, (2019). Pengembangan sektor pariwisata bisa dilihat dalam skala pemerintahan desa. Banyak potensi pariwisata alam yang berada pada wilayah perdesaan. Desa dengan potensi pariwisata yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itu, otonomi desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang yang luas kepada desa untuk mengelola potensi desa yang ada. Pemerintah desa dapat membentuk BUMDes dengan unit usaha yang mengelola sumber daya dengan potensi desa yang ada Teras Desa co.id , (2020).

Mengenai penelitian sebelumnya bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa berkedudukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa melalui pengelolaan objek wisata, karena banyak dari masyarakat Desa yang sebelumnya memiki ekonomi rendah, setelah adanya objek wisata dapat di lihat ekonomi masyarakat meningkat melalui program-program yang di berikan BUMDes *Saragi & Abdullah, (2020).* Dalam hasil penelitian menyatakan Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini sudah sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes. Dari sisi Partisipatif, terlihat sudah berjalan partisipasi dari masyarakat dan sudah kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Pengelola BUMDes selalu terbuka dalam mengelola BUMDes mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes jika dari sisi Transparansi. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat sependapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes Trivena Y.P. Karinda, (2020).

Desa Sanankerto merupakan desa yang sukses mengembangkan desanya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes Kerto Raharjo berdasarkan Peraturan Desa Sanankerto Nomor 5 tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Sanankerto yang mengacu pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan dengan aturan tersebut, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa.

Dengan adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes, BUMDes Kerto Raharjo mendirikan enam unit usaha yang dikelola BUMDes yakni Ekowisata Boon pring, Bank Sampah, Agen BNI, Pengelolaan air bersih (PAB), Event Organizer dan Toko Grosir. Keenam unit usaha sudah berjalan dengan baik dan selalu melibatkan masyarakat sekitar dalam proses perencanaan maupun pengelolaannya. Namun berdasarkan keenam unit usaha tersebut Ekowisata Boon pring yang paling banyak mendapat keuntungan. BUMDes Kerto Raharjo mampu mengelolah objek wisata yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dengan optimal dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ekowisata Boon pring salah satu unit usaha BUMDes yang memperoleh banyak keuntungan disebabkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut juga berpengaruh pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sanankerto yang bersumber dari hasil usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo saat ini unit usaha Ekowisata Boon pring memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan jumlah PADes Desa Sanankerto. Adapun perkembangan pendapatan yang diperoleh BUMDes Kerto Raharjo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adanya peningkatan jumlah PADes Desa Sanankerto tersebut tidak lepas dari pengelolaan BUMDes yang baik dalam mencapai tujuan utama dari berdirinya lembaga tersebut yaitu peningkatan PADes. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan menerapkan berbagai prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Bab III Pasal 4 yang menyatakan BUM Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, sustainable, emansipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan Kerjasama yang baik.

Berdasarkan fenomena yang ada dengan demikian, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui “Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pada Ekowisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa”

**METODE PENELITIAN**

Penetian ini menggunakan peendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu melalui sebuah penelitian Ihyaul Ulum & Ahmad Juanda, (2018). Sedangkan, Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam memahami kontak sosial secara alami terlebih dahulu selanjutnya mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Unit analisis dapat berupa pengelola atau individu lain yang terlibat dalam praktek di lapang. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo seperti kepala desa, direktur utama BUMDes, Sekertaris BUMDes, Bendahara BUMDes dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua yaitu data primer dan data skunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu proses reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dalam wawancara berjumlah 4 orang yang mampu memberikan informasi. Terdapat pada tabel dibawah ini :

***Tabel 1 Informan Penelitian***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Informan** | **Pendidikan** | **Jabatan**  |
| 1 | H. Mohammad Subur, SE  | S1/ Manajemen | Kepala Desa Sanankerto |
| 2 | Drs. H. Samsul Ariffin, M. Si | S2/ Magister Sains | Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo |
| 3 | Sutrisno  | SD | Karyawan Ekowisata Boonpring |
| 4 | Rosida | SMP | Penjual Yang Ada Di Kawasan Boonpring |

 Sumber: diolah penulis

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pada Ekowisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai berikut:**

**Prinsip Kooperatif (Kerjasama)**

Penerapan prinsip kerjasama dalam pengelolaan wisata yang dilakukan oleh BUMDes sudah dikatakan baik dalam kegiatan mengelolah sektor wisata, yakni antara BUMDes dan masyarakat sekitar. kerjasama tersebut dilakukan dengan berbagai pihak dengan orientasi saling menguntungkan, diantaranya di lakukan dengan agen BNI’46 dan perguruan tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BUMDes Kerto Raharjo sebagai berikut:

*“Untuk saat ini pihak swasta yang kita ajak Kerjasama salah satunya BNI. Jadi pihak BNI memberikan bantuan tambahan modal dari kredit usaha rakyat kepada pedagang di Kawasan wisata Boonpring. Atas Kerjasama ini kita juga mendapat dana tanggungjawab sosial (CSR). Diman Kerjasama ini dalam bentuk simbosis mutualistis atau saling menguntungkan ya, kan BUMDes juga membuka agen46”* (Wawancara 3 Mei 2021).

Selanjutnya hal tersebut juga dinyatakan oleh Kepala Desa Sanankerto sebagai berikut :

*“ BUMDes juga berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Malang dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) dalam mengembangkan energi baru dengan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MIkro Hidro (PLTMH) di Kawasan Ekowisata Boonpring untuk mendukung konservasi sumber air di Boonpring”* (Wawancara 4 Mei 2021).

Prinsip kooperatif dalam pengelolaan BUMDes pada Ekowisata Boon pring untuk meningkatkan pendapatan asli desa yaitu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes sudah memiliki hubungan kerja yang baik agar proyek dapat diselesaikan dengan baik. Dalam prinsip kooperatif kepercayaan sangat diperlukan kepada stakeholder ataupun pihak luar yang bekerjasama dalam pengembangan usaha dengan BUMDes. BUMDes Kerto raharjo sudah mampu melakukan kerjasama yang baik untuk pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyajiakan tabel dimana memperjelas terakait kesesuaian terhadap indikator dalam prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

***Tabel 2 Indikator Prinsip Kooperatif Pengelolaan BUMDes***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prinsip** | **Indikator** | **Hasil Wawancara** |
| **Kooperatif** | Melakukan kerja sama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan usaha | Pihak swasta yang BUMDes Kerto Raharjo ajak Kerjasama salah satunya BNI. Dimana pihak BNI memberikan bantuan tambahan modal dari kredit usaha rakyat kepada pedagang di Kawasan wisata Boonpring. BUMDes juga berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Malang dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) dalam mengembangkan energi baru dengan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mkro Hidro (PLTMH) di Kawasan Ekowisata Boonpring |
| Melibatkan terjalinnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan. | Didalam pengelolaan BUMDes terdapat komponen yang terlibat dimana sudah mampu melakukan kerjasama dengan baik. selama ini Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang terlibat sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga BUMDes Kerto Raharjo bangkit dan sekarang mampu meningkatkan perekonomian desa melalui wisata desa |

**Prinsip Partisipatif**

Prinsip partisipatif pada Ekowisata Boon pring sudah dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Semua pihak yang terlibat dalam BUMDes maupun Pemerintah desa dan masyarakat bersedia memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan unit usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat maupun pemerintah desa merupakan pilar utama dalam pengembangan unit usaha BUMDes salah satunya dalam mengembangkan unit usaha Ekowisata Boon pring. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan partisipatif dengan memberikan penyertaan modal sedangkan masyarakat melakukan kegiatan partisipatif dengan merawat, melestarikan serta mendukung dalam berbagai program kegiatan pengelolaan Ekowisata Boon pring yang telah direncanakan oleh BUMdes dalam meningkatkan daya tarik pada sektor wisata. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Direktur BUMDes Kerto Raharjo Sebagai berikut:

*“BUMDes Kerto Raharjo memberi wewenang kepada kelompok sadar wisata maupun karang taruna untuk ikut serta mengelola wisata Boonpring, yaitu dengan pemberian tugas sebagai driver, penjaga parkir, dan penjaga loket serta memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Pembagian tugas yang diberikan kepada kelompok sadar wisata tersebut dijalankan oleh pemuda pemudi karang taruna yang secara bergantian dalam menjaga loket wisata, menjadi driver untuk mengantar pengunjung keliling wisata Boonpring menggunakan perahu boot”*.

Pengelolaan Ekowisata yang melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dimana masyarakat adalah bagian terpenting dari sebuah desa, saat masyarakat bergotong-royong ikut serta dalam peningkatan pengelolaan potensi yang dimiliki desa.Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat adanya ikutserta masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata Boonpring memberikan lapangan pekerjaan baru, Seperti yang dirasakan oleh karyawan Ekowisata Boonpring sebagai berikut:

*“Disini kan banyak anak muda lulusan sekolah menengah yang pengangguran mbak jadi alhamdulillah mbak dengan adanya pengelolaan wisata Boonpring ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi saya dan yang lainnya. Saya sendiri yang dulunya buruh tani sekarang dapat bekerja disini jadi ya dapat meningkatkan perekonomian keluarga”.*

 Adanya dukungan dari pemerintah desa yang ditunjukkan dengan pemberian modal yang menjadi modal awal dalam berdirinya BUMDes Kerto Raharjo. Seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku Direktur Utama BUMDes Kerto Raharjo sebagai berikut:

 *“Sumber keuangan BUMDes diberikan oleh pemerintah desa pada awalnya pembentukan BUMDes yang didapatkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 470 juta rupiah kemudian yang 170 juta untuk pengembangan wisata karena Boonpring kan termasuk unit usaha pertama kita yaa mbak.” (Wawancara 3 Mei 2021).*

Prinsip partisipatif dalam meningkatkan pendapatan Pendapatan Asli Desa sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari komponen yang terlibat seperti pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam BUMDes Kerto Raharjo sudah menunjukkan dukungan dan kontribusi kepada pengelolaan unit usaha Ekowisata Boon pring yang dilakukan oleh BUMDes Kerto Raharjo dengan ikut membantu mengelola dan mengembangkan potensi desa. Kontribusi dari pemerintah desa sudah dijalankan dengan memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Kerto Raharjo. Dukungan dari masyarakat desa juga sudah diberikan, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang peduli dengan pontesi yang ada di desa, masyarakat desa terlibat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti ikut dalam melestarikan dan mengembangkan Ekowisata Boon pring serta mengikuti setiap program yang dilaksanakan oleh BUMDes dan menjadi bagian dari pengurus BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyajiakan tabel dimana memperjelas terakait kesesuaian terhadap indikator dalam prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

**Tabel 3 Indikator Prinsip Partisipatif Pengelolaan BUMDes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prinsip**  | **Indikator** | **Hasil Wawancara** |
| **Partisipatif** | Mekanisme Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha | Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes. |
| Pendirian BUMDes yang disepakati perangkat desa dengan pemberian modal.  | Sumber keuangan BUMDes pada awalnya diberikan oleh pemerintah desa yang didapatkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 470 juta rupiah pada awal mula terbentuknya BUMDes kemudian yang 170 juta untuk pengembangan wisata karena Boonpring |

**Prinsip Transparansi (Keterbukaan)**

Prinsip transparansi untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah kepada masyarakat. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di desa yang berdasarkan kejujuran dan keterbukaan oleh sebab itu pengelolaan BUMDes harus transparan. Pentingnya Transparansi dalam pengelolaan yang baik untuk melihat keberhasilan BUMDes yang dijalankan supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai.

BUMDes Kerto Raharjo setiap 6 bulan sekali melaporkan laporan keuangan dan laporan program kerja yang disusun dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes Kerto Raharjo berisis tentang seluruh evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan mulai dari pengeluaran dana serta pengelola yang bertanggungjawab pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Laporan pertanggungjawaban dilakukan untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, baik jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang dilakukan 2 (dua) kali per tahun dimaksudkan untuk mengetahui kondisi BUMDES di tahun ini. Kegiatan tersebut melibatkan unsur masyarakat seperti RT/RT BPD, serta pemerintah Desa Sanankerto. Hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan Direktur Utama BUMDes Kerto Raharjo yaitu :

*“Laporan pertanggungjawaban melibatkan warga, RT/RW, BPD, dan seluruh perangkat desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali mbak…* b*ahkan mbak kalua ada dari pihak luar pun yang ingin mengetahui LPJ itu bisa diakses dalam bentuk buku di kantor sekertariatan BUMDes ya..”* (Wawancara 3 Mei 2021)

 Prinsip tranparansi pada BUMDes Kerto Raharjo sudah dilaksanakan dengan baik dalam menyediakan informasi BUMDes Kerto Raharjo salah satunya memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban dan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan BUMDes selalu melibatkan masyarakat dan pemerintah desa, jadi dapat dikatakan keterbukaan dalam proses pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo sudah terlaksanakan. Pakaya & Rorong, (2019) masyarakat harus terlibat secara langsung dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengambilan keputusan. prinsip transparansi berkaitan dengan meningkatnya pendapatan asli Desa karena prinsip ini mengedepankan keterbukaan data pada setiap pengelola BUMDes, pemerintah Desa dan masyarakat.

 Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyajiakan tabel dimana memperjelas terakait kesesuaian terhadap indikator dalam prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

***Tabel 4 Indikator Prinsip Transparansi Pengelolaan BUMDes***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prinsip** | **Indikator** | **Hasil Wawancara** |
| **Transparansi** | Direktur BUMDes Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Realisasi Laporan Pertanggungjawab (LPJ) kepada Kepala Desa dan Masyarakat.  | Transparasi itu sebuah kewajiban, jadi BUMDes melaksanakan manajemen secara terbuka kepada pemerintah desa maupun masyarakat desa. BUMDes wajib melaporkan keuangan setiap 6 bulan sekali |
| Laporan pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan 6 bulan sekali yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Kerto raharjo  | Laporan pertanggungjawaban melibatkan warga, RT/RW, BPD, dan seluruh perangkat desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali jadi dalam setahun itu 2 kali mbak |

**Prinsip Akuntabel (Pertanggungjawaban)**

Prinsip akuntabel berkaitannya dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun pemerintah desa, transparasi dan pengungkapan laporan keuangan. Dalam akuntabel dasar pelaporan keuangan dimana masyarakat berhak untuk mengetahui catatan laporan keuangan yang ada pada pengelolaan ekowisata boonpring yang dilakukan oleh BUMDes. Prinsip akuntabel ini sudah diterapkan dan dijalankan dalam pengelolaan ekowisata yang dilakukan oleh BUMDes Kerto Raharjo. Dapat diketahui dalam unit usaha ekowisata bahwa BUMDes Kerto Raharjo membuat catatan pelaporan keuangan mengenai pengembangaan ekowisata sesuai dengan peraturan AD/ART laporan keuangan dilaporkan pada setiap setahun dua sekali. Selain itu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala unit kepada Direktur BUMDes melalui koordinasi internal. Hal ini tentunya akan memudahkan pengetahuan bagaimana perkembangan sektor wisata yang dilakukan oleh dengan melihat hasil dari tugas-tugas dan tanggungjawab yang sudah dilaksanakan. Tanggungjawab dilakukan meyesuaikan dengan peraturan yang terdapat pada AD/ART sehingga dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab selalu berpedoman pada AD/ART BUMDes Kerto Raharjo.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes melalui sektor wisata sudah dapat dipertanggung jawabkan secara keuangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo sebagai berikut:

 *“untuk laporan keuangan sudah menggunakan sistem pembukuan keuangan standart (Akuntansi) seperti Neraca, Rugi / laba, buku bantu, baku kas daftar inventaris dan lain lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes*” (Wawancara 3 Mei 2021).

 Dalam pengelolaan ekowisata yang dijalankan oleh BUMDes, berikut laporan keuangan BUMDes yang disajikan dalam table dibawah sebagai berikut:

***Tabel 5 Laba Usaha Ekowisata Boonpring tahun 2019-2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |
| Pendapatan  | 2.778.720.500 | 3.256.606.100 |
| Beban | 1.312.612.525 | 1.525.478.405 |
|  |  |  |
| Laba Usaha  | **1.446.107.975** | **1.731.127.695** |

Sumber: Arsip BUMDes Kerto Raharjo (diolah penulis)

Berdasarkan dari kondisi keuangan BUMDes tahun 2019 sampai 2021 pada 2019 jumlah dari total pendapatan yang diterima sebesar Rp. 2.77.720.500 dan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 1.312.612.525 sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 1.446.107.975. Sedangkan pada tahun 2020 dari total pendapatan yang diterima sebesar Rp. 3.56.606.100 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.525.478.405 sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 1.731.127.695. Dalam data laporan laba rugi di atas dapat dilihat bahwa pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo mengungkapkan pernyataan sebagai berikut:

*“Sumber keuangan BUMDes Kerto Raharjo didapatkan dari Alokasi Dana Desa sebesar 470 juta rupiah pada awal terbentuknya BUMDes. Kemudian setelah berjalan pada tahun 2019, sumber keuangan BUMDes dalam mengelola Ekowisata Boonpring adalah dari penghasilan loket itu sendiri, pemasukan dari sewa-sewa kios, kamar mandi, persewaan ban dan dari beberapa fasilitas yang ada di ekowisata seperti flaying fox, perahu dan masih banyak lagi. Eh masih ada lagi itu dari parkir mbak, ya lumayan banyak itu. Jadi pengelolaan tidak lagi meminta alokasi dana desa dikarenakan sudah mampu mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan”* (Wawancara 3 Mei 2021)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyajiakan tabel dimana memperjelas terakait kesesuaian terhadap indikator dalam prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

***Tabel 6 Indikator Prinsip Akuntabel Pengelolaan BUMDes***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prinsip**  | **Indikator** | **Hasil Wawancara** |
| **Akuntabel**  | Laporan keuangan BUMDes berdasarkan standar akuntansi | laporan keuangan sudah menggunakan sistem pembukuan keuangan standart (Akuntansi) seperti Neraca, Rugi / laba, buku bantu, baku kas daftar inventaris dan lain lainnya . |

**Prinsip Sustainable (Keberlanjutan)**

Dalam prinsip suistainabel, peneliti menilai bahwa BUMDes Kerto Kerto pada Ekowisata Boon pring sudah berjalan baik dalam meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes Kerto Raharjo telah melakukan pengelolaan Ekowisata Boonpring dengan cara mengupayakan pengembangan wisata secara jangka panjang. Pengelolaan ini adalah sebagai bentuk pelestarian potensi Desa Sanankerto yang harus dimanfaatkan lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat. Prinsip Suistainable sudah dijalankan dengan baik yang dapat dilihat dalam mengelolah daya tarik wisata. Peningkatan kunjungan dari tahun ke tahun tidak lepas dari inovasi yang terus dikembangkan dan juga didukung oleh prasarana dan sarana yang dimiliki objek wisata. Adanya inovasi yang dilakukan memberikan pengaruh positif terhadap daya tarik wisata yang teru meningkat dan dapat bertahan dalam persaingan usaha. Hal ini dapat dilihat berdasarkan table dibawah:

***Tabel 7 Data Kunjungan Wisata Boonpring 2019 – 2020***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **2019** | **2020** |
| 1 | Januari | 22.757 | 24.708 |
| 2 | Februari | 10.652 | 13.698 |
| 3 | Maret | 8.331 | 2.995 |
| 4 | April  | 9.274 | 3.348 |
| 5 | Mei | 5.527 | 5.997 |
| 6 | Juni | 13.149 | 10.378 |
| 7 | Juli  | 16.654 | 15.919 |
| 8 | Agustus | 13.336 | 19.407 |
| 9 | September  | 9.011 | 15.080 |
| 10 | Oktober | 9.363 | 16.935 |
| 11 | November | 11.788 | 13.381 |
| 12 | Desember | 20.367 | 20.108 |
| **Total**  | **150.209** | **161.954** |

Sumber: Arsip BUMDes Kerto Raharjo (diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2019 sebanyak 150.209 dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 161.954. Data tersebut memenuhi syarat untuk menunjang pengelolaan BUMDesa yang berkelanjutan. Jika dilihat dari kunjungan wisata yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun tentunya juga dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pengelola yang terus dikembangkan, sehingga wisatawan merasa nyaman dan ingin datang kembali untuk berwisata di Ekowisata Boonpring. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang diungkapkan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo sebagai berikut:

*“Jadi mbak inovasi harus terus dilakukan, karena wisatawan tidak akan berdatangan jika kita tidak melakukan inovasi. Kami juga melakukan strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan dengan promosi melalui media sosial seperti website, facebook ataupun youtube.”* (Wawancara 3 Mei 2021).

 Keberadaan BUMDes diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar Desa dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Filya, (2018) dalam sustainabel harus dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes.

 Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyajiakan tabel dimana memperjelas terakait kesesuaian terhadap indikator dalam prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

***Tabel 8 Indikator Prinsip Sustainabel Pengelolaan BUMDes***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prinsip**  | **Indikator** | **Hasil Wawancara** |
| **Sustainable** | Melakukan rencana pengembangan usaha yang berkelanjutan  | Jadi mbak inovasi harus terus dilakukan, karena wisatawan tidak akan berdatangan jika kita tidak melakukan inovasi. Kami juga melakukan strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan dengan promosi melalui media sosial seperti website, facebook ataupun youtube |

**Kontribusi BUMDes Kerto Raharjo Pada Pengelolaan Ekowisata Boon pring Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa**

 Keberadaan BUMDes diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar Desa dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Hal ini dapat di lihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

**Tabel 9 Bagi Hasil Usaha (SHU) BUMDes Kerto Raharjo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Presentase | Jumlah SHU Tahun 2019 | Jumlah SHU Tahun 2020 |
| 1 | Untuk Cadangan Umum | 5 % | 72.305.399 | 86.556.385 |
| 2 | Dana Pengembangan Usaha  | 20% | 289.221.595 | 346.225.539 |
| 3 | Dana Karyawan  | 10 % | 144.610.797 | 173.112.769 |
| 4 | Dana Kesehatan  | 1 %  | 14.461.080 | 17.311.277 |
| 5 | Jasa Purna Bakti | 3% | 43.383.239 | 51.933.831 |
| 6 | Pembinaan dan Pelatihan  | 5%  | 72.305.399 | 86.556.385 |
| 7 | Dana Pengurus  | 10 % | 144.610.797 | 173.112.769 |
| 8 | Dana Pengawas  | 7 % | 101.227.558 | 121.178.939 |
| 9 | Untuk PADes | 39% | 433.832.393 | 519.338.309 |
| **TOTAL SHU** | **100 %** | **1.446.107.975** | **1.731.127.695** |

 Sumber: Arsip BUMDes Kerto Raharjo (diolah penulis)

Berdasarkan data di atas merupakan dana bagi hasil dari Ekowisata Boonpring yang dikelolaan oleh BUMDes, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Samsul Ariffin, selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo sebagai berikut:

*“Untuk PADes berdasarkan presentase bagi hasil usaha yang tertera dalam AD (Anggaran Dasar) ya mbak. Jadi mbak kalau pendapatan Boonpring naik otomatis PADes juga akan ikut naik gitu.”* (Wawancara 3 Mei 2020).

Keberhasilan dalam mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan Ayu & Desi, (2017) peran BUMDes diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar desa dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan baik sehingga dapat meningkatkanjumlah Pendapatan Asli Desa. Keberhasilan pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam mengelolah potensi-potensi desa yang dimiliki. Peningkatan usaha Pendapatan Asli Desa dapat dilihat dalam pelaksanaan pembagian hasil usaha BUMDes Kerto Raharjo dalam pengelolaan wisata sudah mampu memberikan kontribusi terhada Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan dari tabel diatas bahwa jumlah kontribusi BUMDes Kerto Raharjo terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) pada tahun 2019 sampai 2020 sebanya 39% dari pendapatan. BUMDes Kerto Raharjo memberikan dampak positif dalam perekonomian Desa Sanankerto. Berdasarkan tabel diatas diketahui pengelolaan Ekowisata Boonpring memberikan pendapatan bagi desa yang begitu besar.

**Faktor Hambatan Prinsip Pengelolaan BUMDes Pada Ekowisata**

Dalam penerapan prinsip pengelolaan BUMDes pada Ekowisata terdapat beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kualitas pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes

Pemaham masyarakat tekait prinsip pengelolaan BUMDes masih rendah, hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Kerto raharjo sebagai berikut:

*“Jadi mbak prinsip tata kelolah BUMDes dari pengetahuannya masih rendah, jadi kita terus memberikan sosialisasi ataupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang pengelolaan bUMDes yang baik kepada anggota maupun masyarakat, biar sama-sama tau sam-sama mengembangkan wisata gituu kan” (Wawancara 3 Mei 2021).*

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang baik dapat dipengaruhi oleh factor Pendidikan, dimana di dalam pengelolaan BUMDes pada Ekowisata ini yang memiliki Pendidikan tinggi hanya sedikit. Hal ini juga diperkuat dengan pernyatakan dari Kepala Desa Sanankerto sebagai berikut:

*“Jadi kami sering mengikutkan pengurus BUMDes untuk mengikuti pelatihan kesana kesini. Yaa kemudian dari karyawan juga dari pariwisata mengikuti pelatihan-pelatihan tour gate kemudian mengikuti studi banding kemana-mana. Kita juga sering kedatangan studi banding dari luar, jadi dari sini kita dapat bertukar informasi dengan pihak lain atau desa yang lain bagaimana pengelolaan wisatanya dan sebagainya. Itu kan sebuah cara untuk menjadikan sumber daya manusia yang dikita miliki jadi berkualitas ya mbakk…” (Wawancara 4 Mei 2021).*

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo pada Ekowisata Boonpring sudah meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini dapat dilihat:

1) Prinsip kooperatif sudah terlihat cukup maksimal bentuk kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa, masyarakat maupun pihak ketiga seperti Agen BNI46 dan perguruan tinggi.

2) Prinsip Akuntabel telah dinilai cukup bertanggung jawab yang dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan setiap dua kali dalam setahun, adapunpertanggungjawaban dalam laporan laba rugi, neraca arus kas dan lain-lain.

3) Prinsip Sustainable secara empiris sudah dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik adanya kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berdasarkan dari proporsi SHU Pendapatan Unit Usaha Ekowisata Boonpring.

4) Prinsip Partisipatif sudah dapat berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari adanya dukungan pemerintah dan dukungan dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Akan tetapi terdapat faktor pemhambat dalam prinsip partisipatif yakni berupa sumber daya manusia (SDM) karena rata-rata masyarakat lulusan sekolah menengah pertama yang masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Jadi BUMDes Kerto Raharjo dan pemerintah desa terus memberikan pelatihan dan dengan adanya studi banding agar mereka mampu mengembangkan Ekowisata Boon pring dengan lebih mumpuni

5) Prinsip Transparansi sudah baik dalam peningkatan pendapatan asli desa. Hal ini dapat dilihat BUMDes selalu menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan keuangan kepada pemerintah desa dan masyarakat secara jelas serta dapat diakses dengan mudah.

Dalam penerapan prinsip pengelolaan BUMDes terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu kurangnya pengetahuan SDM dan kurangnya kualitas SDM sehingga perlu diberikan pelatihan sehingga dapat menjadi SDM yang berkualitas sehingga dapat mengelolah wisata dengan baik .

**SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah disebutan diatas, berikut saran yang dapat peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya:

Saran saya bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah priode tahun data yang digunakan seperti lebih dari 2 tahun sehingga lebih mendukung penelitian dalam melihat peningkatan pendapatan asli desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ayu, I. G., & Desi, R. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. *1*(1).

Dr. Ihyaul Ulum, SE., M.Si., Ak., C., & Dr. Ahmad Juanda, MM., AK., C. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI*.

Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, *5*(1), 19–39. http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393

Pakaya, N., & Rorong, A. (2019). Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(74).

Saragi, N., & Abdullah, A. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *6*(2), 17. https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6894

Teras desa. (2020). *Membangun Pariwisata Daerah Lewat BUMDes*. 14 Januari. https://www.google.co.id/amp/s/terasdesa.co.id/membangun-pariwisata-daerah-lewat-bumdes/

Trivena Y.P. Karinda, W. W. A. K. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Politico*, *9*(3).

Vincent Fabian Thomas. (2019). *Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?* 16 Desember. https://tirto.id/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah-enpb